

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PERBERASAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA

Atika Fatimah, S.E., M.Ec.Dev.

Universitas AMIKOM Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok Yogyakarta, Telp. (0274) 884201
Email : atika.fatimah@amikom.ac.id

Abstract

Beras merupakan salah satu komoditi penting di Indonesia. Permasalahan utama beras adalah harga yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh kebijakan perberasan yang ada gagal mencapai kestabilan harga hingga berujung pada penurunan kesejahteraan petani. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan perberasan terkini memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani. Indikator yang dipakai untuk mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Sedangkan indikator kebijakan perberasan memakai empat instrumen kebijakan pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi Beras Medium (HET Medium), Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium), Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) dan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling (GKG). Data penelitian adalah data sekunder yang berasal dari BPS. Metode penelitian yang dipakai adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).

Kata kunci : Beras, Kebijakan, Petani, Kesejahteraan, NTP, HET, HPP

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Beras merupakan komoditas terpenting di Indonesia karena 80 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras (IRRI World Rice Statistics dalam Ikhsan, 2015 : 5). Hal ini juga didukung oleh data IRRI yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan rangking ke-5 secara global untuk konsumsi kalori beras per kapita. Beras telah menyumbangkan lebih dari 55 persen konsumsi energi dan protein bagi rata-rata penduduk Indonesia. Pentingnya komoditas beras tidak berbanding lurus dengan harga beras yang tinggi. Hal ini dibuktikan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari harga beras dunia yang digambarkan pada grafik berikut.

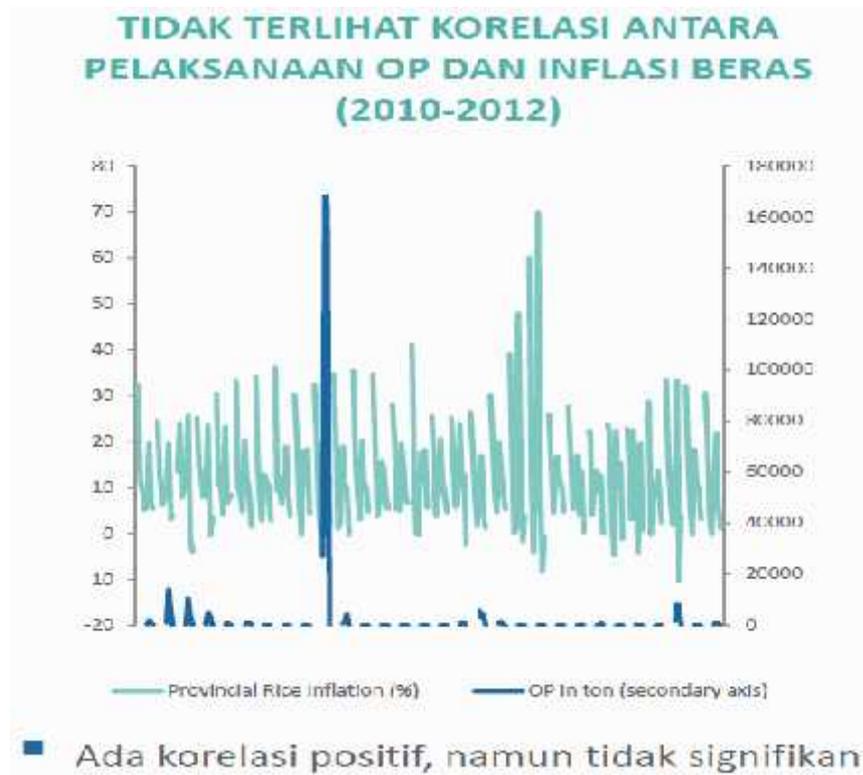


Sumber : BPS, CEIC dalam Ikhsan, 2015

Gambar 1.1 Grafik Harga Beras di Indonesia Konsisten Lebih Tinggi dari Harga Dunia Sejak 2004

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata harga beras lebih tinggi dari dunia yang dibandingkan oleh harga beras Vietnam. Dari tahun 1997 hingga 2014 harga beras Indonesia terus merangkak naik di harga Rp. 7300/kg mengingat Indonesia adalah Negara agraris. Hal ini menyebabkan perberasan di Indonesia mulai diatur oleh kebijakan perberasan yang bertujuan menjaga kelangsungan produksi beras domestic dan melindungi petani padi. Kebijakan per berasan mulai diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2002 yaitu penetapan Harga Dasar Pembelian (HDP) oleh Bulog di gudang Bulog sebesar Rp. 1725/kg Gabah Kering Giling (GKG) atau Rp. 2790/kg beras dan mengimpor beras dengan memberlakukan tariff impor beras yaitu Rp. 430/kg (Suryana, 2003: 6). Adanya kebijakan impor beras disebabkan oleh pada tahun 1990 *supply* beras domestic tidak lagi mampu memenuhi laju kebutuhan beras dalam negeri, sehingga dilakukan impor. Impor beras yang terus meningkat dari tahun ketahun menjadikan Indonesia Negara *net impoter* beras (Suryana, 2003: 4). Selanjutnya kedua instrument kebijakan ini menjadi tidak efektif sebab adanya pasar beras yang terbuka yang menyebabkan harga beras impor lebih murah daripada harga beras domestic yang semakin menekan petani padi serta tarif bea impor yang terlalu rendah (Saifullah : 2001, 8).

Begitu jugadenganperaturanoperasi pasar yang mengaturperberasanpada tahun 2012. Operasi pasardilakukanpemerintah untuk stabilisasi harga beras tetapi tidak efektif. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berikut,



Sumber : Kemendag dan BPS dalam Ikhsan, 2010-2012

Gambar 1.2 Grafik Korelasi Pelaksanaan Operasi Pasar dan Inflasi Beras 2010-2012

Implementasi operasi pasar menimbulkan beberapa masalah antara lain, trigger harga dimana pemantauan harga beras oleh Pemda tidak reguler. Kemudian distribusi terhambat yang disebabkan oleh rendahnya stok digudang regional Bulog. Hal ini mengakibatkan operasi pasar terlambat bahkan tidak terlaksana karena proses yang kaku dan panjang.

Kebijakan-kebijakan perberasan diatas dinilai kurang berhasil dalam stabilisasi harga beras sehingga pada 1 September 2017 ditetapkan dua instrument kebijakan terbaru yaitu HET (Harga Eceran Tertinggi) dan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) (Permen Nomor 57/M-DAG/Per/8/2017, 2017 : 3).HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya. Kebijakan ini menjadi sebuah dilema sebab disatu sisi kebijakan HET masih belum efektif karena mengakibatkan inflasi tapi disisi lain HET mampu menekan harga beras.

Kebijakan-kebijakan beras ini nantinya berujung pada tujuan untuk melindungi petani padi yang tercermin dalam kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang menentukan proxy kesejahteraan petani ialah nilai tukar petani (NTP) (Rachmat, 2013 : 1). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perberasan yaitu dua instrumen kebijakan ialah Harga Pembelian Pemerintah dan HET (Harga Eceran Tertinggi) terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Harga Eceran Tertinggi Beras Medium (HET Medium), Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium), HPPGKP, dan Harga PP GKG terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Beras

Beras adalah biji-bijian baik berkulit tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*. Beras pada Harga Eceran Tertinggi (HET) dibedakan menjadi dua yaitu beras medium dan beras premium. Beras medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen. Beras premium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 15 persen.

2.2 Pengertian NTP

NTP adalah perbandingan indeks yang diterima petani (IT) terhadap indeks harga yang dibayar (IB). Indeks harga yang diterima petani (IT) merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk produksi pertaniannya. Sedangkan indeks yang dibayar petani (IB) merupakan ukuran perubahan harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian. Apabila NTP lebih dari 100, maka kondisi petani lebih baik dari tahun dasar dan begitu sebaliknya. Jika nilai NTP sama dengan 100 berarti petani impas dimana kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi atau pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Jadi NTP merupakan salah satu ukuran kesejahteraan petani karena menggambarkan daya beli pendapatan petani (Rachmat, 2013 : 111).

Nilai NTP tentunya bermanfaat sebagai informasi ekonomi antara lain dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan

pendapatan sektor pertanian. Lalu Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain (BPS, 2018 : 1).

2.3 Instrumen Kebijakan Perberasan

2.3.1 HET (Harga Eceran Tertinggi)

Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut Peraturan Menteri Nomor 57 tahun 2017 adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya. Berikut adalah Harga Eceran Tertinggi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di Indonesia.

Tabel 2.1 Harga Eceran Tertinggi Beras di Indonesia

No.	Wilayah	HET Medium (Rp/Kg)	HET Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan	9450	12800
2	Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan	9950	13300
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	9450	12800
4	Nusa Tenggara Timur	9950	13300
5	Sulawesi	9450	12800
6	Kalimantan	9950	13300
7	Maluku	10250	13600
8	Papua	10250	13600

Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57, 2017

2.3.2 HPP (Harga Pembelian Pemerintah)

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah menyatakan bahwa harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen, dan derajat

sosoh minimum 95 persen adalah Rp. 7300 per kilogram di gudang Perum Bulog. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dibagi menjadi dua yakni harga pembelian pemerintah gabah kering panen dan harga pembelian pemerintah gabah kering giling. Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dinyatakan dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen adalah Rp. 3700 per kilogram dipetani atau Rp. 3750 per kilogram di penggilingan. Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling (GKG) dalam negeri dinyatakan dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 persen adalah Rp. 4600 per kilogram dipenggilingan atau Rp. 4650 per kilogram di gudang Perum Bulog.

2.4 Teori Keseimbangan Umum

Teori keseimbangan umum berbicara mengenai cara konsumen dan produsen mencapai keseimbangan dengan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi dan mekanisme pasar menjadi alat distribusi kesejahteraan melalui pertukaran. Perekonomian berjalan efisien ketika :

- a. Optimalisasi Pareto yakni alokasi sumber daya efisien jika barang dan jasa yang tidak dapat direalokasikan antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan
- b. Efisiensi faktor produksi yakni penggunaan faktor produksi efisien jika faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output yang satu tidak dapat direalokasikan untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan (Nugraha, 2017 : 4)

3. Metode Penelitian

3.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data *time series* terbaru yaitu Februari 2017 sampai Februari 2018. Data berupa data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terdiri dari Harga Eceran Tertinggi Beras Medium (HET Medium) dan Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium), serta Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terdiri dari GKP (Gabah Kering Panen) dan GKG (Gabah Kering Giling), dan Nilai Tukar Petani (NTP).

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menghitung Nilai Tukar Petani merupakan hasil formulasi dari Indeks Harga *Laspeyres* seperti yang telah dikembangkan oleh BPS (2995). Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima

petani (IT) dengan harga yang dibayar petani (IB) atau dapat diformulasikan kedalam rumus:

$$NTP = \frac{IT}{IB} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

IT = Indeks harga yang diterima oleh petani

IB = Indeks harga yang dibayarkan oleh petani

NTP didapatkan dari penurunan indeks *Laspeyres* sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum Q_0 P_t}{\sum Q_t P_0} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

I = Indeks Laspeyres

Q₀ = Kuantitas pada tahun dasar

P₀ = Harga pada tahun dasar

P_t = Harga pada tahun ke t

Sehingga BPS memodifikasi indeks *Laspeyres* diatas menjadi Indeks harga yang dibayarkan petani dan diterima petani sebagai berikut:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni} - P_{(n-1)i}}{(n-1)^2} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} Q_{0i}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

I_n = Indeks harga tahunan tahun ke n (IT dan IB),

P_{ni} = Harga tahun ke n untuk jenis barang ke i,

P_{(n-1)i} = Harga tahunke (n-1) untuk jenis barang ke i,

P_{ni}/P_{(n-1)i} = Relatif harga tahun ke n untuk jenis barang ke i,

P_{0i} = Harga dasar tahun dasar untuk jenis barang ke i,

Q_{0i} = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke i,

m =Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas.

Kemudian pengukuran pengaruh HET dan HPP terhadap NTP menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *software* SPSS. Data yang dibutuhkan adalah HET Beras Medium, HET Beras Premium, HPP Gabah Kering Panen, HPP Gabah Kering Giling dan NTP dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Izzah, 2015 : 11),

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

Y = Nilai Tukar Petani

a = Intercept

b_1 - b_4 = Koefisien regresi

X_1 = HET Beras Medium (Rp/kg)

X_2 = HET Beras Premium (Rp/kg)

X_3 = HPP GKP (Rp/kg)

X_4 = HPP GKG (Rp/kg)

e = error

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan regresi linier berganda maka didapat persamaan regresi sebagai berikut,

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$NTP = 0,98 - 0,25 \text{ HET Medium} + 0,075 \text{ HET Premium} + 1,799 \text{ GKP} - 0,928 \text{ GKG} + e$$

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,835. Hasil ini menerangkan bahwa variabel-variabel bebas (HET Beras Medium, HET Beras Premium, HPP GKP, HPP GKG) mampu menjelaskan variabel terikat (NTP) sebesar 0,835 atau 83,5 persen sedangkan 16,5 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Jika dibandingkan dengan $\alpha = 10\%$ maka nilai signifikansi uji F yakni sebesar 0,003 lebih kecil daripada α yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh HET Medium, HET Premium, HPP GKP, dan HPP GKG terhadap Nilai Tukar Petani secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 90%.

Variabel HET Medium yang Dijual memiliki signifikansi sebesar 0,25 yang bernilai lebih besar daripada 0,1. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras Medium (HET Premium) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani.

Variabel HET Premium memiliki signifikansi sebesar 0,075 yang bernilai lebih kecil daripada 0,1. Pengujian ini menunjukkan bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani. Besarnya nilai b_2 adalah 0,075 dan bertanda positif memiliki arti bahwa ketika Harga Eceran Tertinggi Beras Premium meningkat 1 persen maka Nilai Tukar Petani akan meningkat sebesar 0,075 persen.

Variabel HPP GKP memiliki signifikansi sebesar 1,799 yang bernilai lebih besar dari 0,1. Pengujian ini menunjukkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (HPP GKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).

Variabel HPP GKG memiliki signifikansi sebesar 0,928 yang bernilai lebih besar dari 0,1. Pengujian ini menunjukkan bahwa Harga Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling (HPP GKG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).

5. Kesimpulan

Harga Eceran Tertinggi Beras Premium (HET Premium) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) artinya hanya kebijakan HET Beras Premium yang efisien mempengaruhi kesejahteraan petani. Sedangkan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium (HET Medium), Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (HPP GKP), dan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling (HPP GKG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Hal ini disebabkan karena harga beras premium meningkatkan pendapatan petani karena harga beras premium lebih tinggi dari harga beras medium sehingga diaturnya harga eceran tertinggi untuk beras premium berdampak pada peningkatan pendapatan yang meningkatkan pula kesejahteraan petani. Sedangkan HET beras medium tidak efisien dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebab harganya masih terlalu rendah dan belum memberikan imbal balik biaya yang petani keluarkan untuk memproduksi beras medium.

Daftar Pustaka

- BPS. 2018. **Konsep Nilai Tukar Petani**. (<https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html> diakses 29 Maret 2018)
- BPS. 2018. **Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah**. BPS : Jakarta
- Ikhsan, Mohamad et al. 2015. **Apa Yang Salah Dengan Kebijakan Perberasan Kita?**. (<http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2015/03/Apa-yang-salah-dengan-kebijakan-perberasannew.pdf> diakses 20 Maret 2018)
- Izzah, Niddaul. 2015. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jakarta 2004-2013. *Jurnal Ilmiah Administrasi*. Vol. 7 No. 1, pp: 1-15
- Kementrian Perdagangan. 2017. **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras**. Kementrian Perdagangan : Jakarta.
- Khudori. 2017. **Kebijakan Perberasan di Simpang Jalan**. Kompas. (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171209/281646780477161> diakses 1 Maret 2018)
- Nirmala, Arlia Renaswari et al. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Habitat*, Vol. 27 No. 2, pp: 66-71
- Nugraha, Snda. 29 Mei 2017. **Teori Keseimbangan Umum dan Kesejahteraan Ekonomi**. Universitas Langlangbuana Bandung.

(<https://www.scribd.com/doc/56588270/Teori-Keseimbangan-Umum-Dan-Kesejahteraan-Ekonomi> diakses 12 Maret 2018)

- Rachmat, Muchjidin. 2013. Nilai Tukar Petani : Konsep Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 31 No.2 , pp: 111-122
- Saifullah, Agus. 2001. **Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional**. (<http://bulog.co.id/data/doc/20070321aPapBulBer.pdf> diakses 16 Maret 2018)
- Soekarnoputri, Megawati. 2002. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Perberasan**. Presiden : Jakarta.
- Suryana, Achmad. 2003. Situasi Perpadian/Perberasan Nasional Kini dan Masa Mendatang. *Seminar dan Lokakarya Nasional PERPADI*. Universitas Brawijaya, Malang